

**PENGEMBANGAN ORGANISASI
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)
DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA**

I Dewa Made Wiratma

NPP. 29.0719

Asdaf Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: dmadewirra@gmail.com

ABSTRACT

Problem statement/Background (GAP): This research is entitled "Organizational Development of the Regional Leadership Coordination Forum (FORKOPIMDA) in Supporting the Implementation of Duties and Functions of Organizing Public Government Affairs in Bolaang Mongondow Regency, North Sulawesi Province". **Purpose:** The purpose of writing this thesis is to identify and analyze the organizational development of the regional leadership coordination forum (FORKOPIMDA) in supporting the implementation of the duties and functions of the administration of general government affairs, to identify and analyze the supporting and inhibiting factors for the organizational development of the regional leadership coordination forum (FORKOPIMDA) in supporting the implementation of tasks. and the function of administering general government affairs, to identify and analyze efforts to overcome the factors that hinder the development of the regional leadership coordination forum organization (FORKOPIMDA) in supporting the implementation of the duties and functions of the administration of general government affairs. **Method:** This research is a qualitative research with descriptive method and using an inductive approach. The research method used in the form of observation, documentation and interviews. **Conclusion:** In the development process, the existing inhibiting factors did not become a problem in the Organizational Development of the Regional Leadership Coordination Forum in Bolaang Mongondow Regency. **Result:** Based on the results of this study, it can be concluded that development has not occurred in the organization of the Regional Leadership Coordination Forum of Bolaang Mongondow Regency, North Sulawesi Province, but the implementation of the duties and functions of organizing general government affairs is still carried out.

Keywords: Organizational Development, FORKOPIMDA

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini berjudul "Pengembangan Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara". **Tujuan:** Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengembangan Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Pengembangan Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, untuk mengetahui dan menganalisis upaya dalam mengatasi faktor

penghambat Pengembangan Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Teori yang digunakan untuk melihat Pengembangan Organisasi adalah Pendekatan Model Sistem Perubahan yang dikemukakan oleh Kreitner dan Kinicki diterjemahkan oleh Biro Bahasa Alkemis (2014) yakni input, rencana strategis, elemen-elemen target perubahan dan output. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan Induktif. Metode penelitian yang digunakan berupa Observasi, Dokumentasi dan Wawancara. **Hasil/Temuan:** Dalam proses pengembangannya faktor-faktor penghambatan yang ada tidak menjadi masalah dalam Pengembangan Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan belum terjadi di organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara tetapi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tetap terlaksana.

Kata kunci: Inovasi, Perpustakaan, Layanan Perpustakaan



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan paradigma dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi menjadi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum merupakan urusan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota dibantu oleh Instansi Vertikal sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Instansi Vertikal adalah perangkat dari departemen atau lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga daerah.

Namun secara realita walaupun penyelenggaraan urusan pemerintahan secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun sampai saat ini belum dibiayai melalui APBN seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang, hal ini disebabkan karena belum ada regulasi yang mengatur khusus tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, hal ini tentunya secara tidak langsung dapat menghambat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan oleh Presiden.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga diatur secara tegas mengenai pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Forkopimda Provinsi), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Forkopimda Kabupaten/Kota) dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Forum ini berfungsi untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah. Mengingat belum ada regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan Forkopimda, maka kegiatan Forkopimda provinsi saat ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi tetapi peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi di ganitkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Pengembangan Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ini pada dasarnya, adalah untuk meningkatkan aktivitas organisasi dalam mencapai efektifitas organisasi dan memungkinkan organisasi untuk mencapai sasaran strategisnya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

- Belum adanya peraturan Bupati yang mengatur tentang forum koordinasi pimpinan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Belum terbentuknya Kelembagaan forum koordinasi pimpinan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Rendahnya Intensitas pertemuan atau rapat yang di adakan
- Adanya tumpang tindih kegiatan forum koordinasi pimpinan daerah dengan tugas dan fungsi perangkat daerah

1.3. Penelitian Terdahulu

Fungsi Forum Koordinasi Pemerintahan Daerah (Forkopimda) Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Sri Maulidiah, 2018) menemukan bahwa, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dibentuk berdasar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara historis Forum Koordinasi Pimpinan daerah (FORKOPIMDA) dahulunya dalam bentuk Musyawarah Pimpinan Daerah atau yang disingkat MUSPIKA Fungsi Forum koordinasi Pimpinan Daerah adalah suatu wadah untuk dapat menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum oleh pemerintah daerah. Serta kegiatan yang terkait dengan FORKOPIMDA dibiayai melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Negara.

Penelitian berjudul Peranan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus Di Provinsi Dki Jakarta (Andi Azikin, 2018) menemukan bahwa Peranan Fokopimda DKI Jakarta adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan daerah di Provinsi DKI Jakarta. Agar dalam pembangunannya Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan dengan lancar dan juga mempertahankan fungsinya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka para stakeholders, terutama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Fokopimda DKI Jakarta menyelenggarakan pemerintahan daerah dapat berjalan efektif dan efisien, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana bentuk penelitian, lokus, serta *grand theory* berbeda. Penelitian ini berbentuk skripsi di mana isinya lebih luas daripada artikel-artikel jurnal di atas. Selain itu penelitian di atas tidak memiliki *grand theory* yang menjadi alat ukur pengembangan sebuah organisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan bahan melalui dokumen. meninjau, mengamati, atau mempelajari studi normatif lainnya. Sementara itu, penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang ril. *Grand theory* yang digunakan adalah milik Kreitner dan Kinicki (2014) yang mengukur pengembangan organisasi melalui Input, Rencana strategis, Elemen-elemen target perubahan dan Output.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Pengembangan Organisasi, faktor-faktor pendukung dan penghambat pengembangan organisasi, serta upaya mengatasi faktor-faktor penghambat pengembangan organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan. Dalam wawancara, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk mendapatkan informasi. 15 informan mencakup Bupati Bolaang Mongondow, Ketua DPRD Bolaang Mongondow, Wakil Bupati Bolaang Mongondow, Sekertaris Daerah Bolaang Mongondow, Kepala Bappedda Bolaang Mongondow, Kepala Bagian Kesatuan Bangsa Dan Politik Bolaang Mongondow, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Bolaang Mongondow, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Bolaang Mongondow, Kepala Bagian Organisasi Bolaang Mongondow, Kepala Bagian Kerjasama Bolaang Mongondow dan Kapolres Bolaang Mongondow. Adapun dokumen kedinasan didapatkan melalui dokumentasi dan data lapangan diperoleh melalui observasi. Sumber data yang digunakan berasal dari 3p yaitu paper atau berupa dokumen, person berupa informan serta place atau tempat sebagai tempat observasi. Data tersebut diolah menggunakan triangulasi data sehingga dihasilkan sebuah analisis yang akurat dan presisi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengembangan Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara

Kreitner dan Kinicki menjelaskan ada empat komponen dari model sistem perubahan yang digunakan untuk mendiagnosis apa saja yang harus dirubah dalam sebuah organisasi meliputi input, rencana strategis, elemen-elemen target perubahan, dan output. Empat komponen tersebut yang digunakan untuk melihat bagaimana Pengembangan Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow.

3.1.1. Input

Pengembangan organisasi harus konsisten dengan Visi dan Misi yang dimiliki oleh organisasi forum koordinnasi pimpinan daerah, Visi oragnisais merupakan tujuan jangka panjang yang menggambarkan apa yang ingin dicapai organisasi dan sebuah pernyataan Misi organisasi mewakili alasan keberadaan sebuah organisasi, maka Pengembangan Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow yang pertama dilihat dari Visi dan Misinya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 26 ayat (1) menyebutkan, Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan. Visi dan Misi dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow dapat mengacu pada kedua peraturan perundang undang yang ada dan di sinergikan dengan Visi Misi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

3.1.2. Rencana strategis

Pengembangan organisasi forum koordiansi pimpinan daerah juga harus dibarengi dengan strategi dan tujuan agar pengembangan organisasi ini nantinya dapat dijadikan contoh kedepannya. Sebuah rencana strategis menguraikan arahan organisasi jangka panjang dan tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. dalam pengembangan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sangatlah penting rencana strategis karena Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ini melibatkan beberapa instansni vertikal yang satu dan lainnya.

strategi pengembangan organisasi adalah usaha terencana didalam suatu wadah kegiatan suatu kelompok dalam proses peningkatan sistem kerjanya guna mencapai tujuan tertentu, strategi dalam

pengembangan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dapat di rumuskan secara bersama sama sehingga pengembangan forum koordinasi ini dapat berjalan sesuai dengan Visi, Misi dan rencana strategi yang telah di rumuskan.

Tujuan Pengembangan Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di harapkan dapat memberikan dampak positif guna memajukan organisasi lebih unggul. Merubah pandangan terhadap organisasi dan semakin memperluas wawasan. Mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan teknologi. Tujuannya yang jelas seperti yang telah di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.

3.1.3. Elemen-elemen target perubahan

Elemen target perubahan merupakan komponen dari sebuah organisasi yang mungkin berubah. Elemen-elemen tersebut secara esensial mewakili tuas perubahan yang dapat ditarik dan didorong untuk memengaruhi beragam aspek organisasi. Untuk melihat bagaimana pengembangan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow ada empat elemen perubahan yaitu Penyusunan Organisasi, Orang, Metode, Dan Faktor Sosial.

3.1.4. Output

Output mewakili hasil akhir yang diharapkan dari sebuah perubahan. Hasil akhir ini harus konsisten dengan rencana strategis organisasi. Uraian diatas mengindikasikan bahwa perubahan dapat diarahkan pada tingkat organisasi, tingkat departemen/kelompok, atau tingkat individu. Dalam Pengembangan Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pengembangannya di harapkan nantinya dapat di lihat dari ketiga level yang telah di sebutkan di atas.

3.2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengembangan Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara

Faktor pendukung dan faktor penghambat Pengembangan Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow menurut Robbins dan Judge yaitu faktor pendukung kekuatan perubahan hakikat tempat kerja, pengaruh teknologi, guncangan ekonomi, persaingan, kecendrungan sosial, dan perkembangan politik global. Untuk faktor penghambat perlawanan perubahan terbagi menjadi dua yaitu yang pertama faktor penghambat dari organisasi kebiasaan, keamanan, faktor ekonomi, ketakutan akan ketidaktahuan, dan pemrosesan informasi secara selektif. Yang kedua faktor penghambat dari individu kelemahan struktural, fokus yang terbatas, kelemahan kelompok, ancaman akan keahlian, ancaman akan kekuatan hubungan, dan ancaman akan aloasi sumber daya.

3.2.1. Faktor pendukung: kekuatan perubahan

Faktor pendukung kekuatan perubahan merupakan faktor yang dapat mendukung Pengembangan Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow.

1. Kecendrungan sosial
2. Persaingan
3. Guncangan Ekonomi
4. Pengaruh Teknologi
5. Hakikat Tempat Kerja
6. Perkembangan Politik Global

3.2.2. Faktor penghambat dari individu: perlawanan perubahan

Faktor penghambat dari individu merupakan faktor penghambat yang berasal dari individu. Perubahan individu ini berasal dari diri mereka sendiri dimana mereka merasa bahwa perubahan itu mengharuskan mereka juga harus ikut menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Perubahan individu disini sangatlah sentral karena tenaga kerja sangat berpengaruh dalam kemajuan organisasi itu sendiri dan juga memberikan pengaruh dalam perubahan ekonomi yang ada dalam organisasi. Dengan begitu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah harus dapat mengatasi faktor penghambat pengembangan yang berasal dari individu.

1. Kelemahan Struktural
2. Fokus yang Terbatas
3. Kelemahan Kelompok
4. Ancaman Akan Keahlian
5. Ancaman akan Kekuatan Hubungan
6. Ancaman Akan Alokasi Sumber Daya

3.2.3. Faktor penghambat dari organisasi : perlawanan perubahan

Faktor penghambat dari organisasi merupakan faktor penghambat yang secara keseluruhannya meliputi organisasi. Perubahan organisasi merupakan suatu proses yang sistematis yakni perubahan dari sebuah topik yang hanya menarik untuk beberapa akademisi dan praktisi menjadi sesuatu topik yang menarik untuk para eksekutif perusahaan untuk kelangsungan hidup organisasi.

1. Kebiasaan
2. Keamanan
3. Keamanan
4. Ketakutan Akan Ketidaktahuan
5. Pemrosesan Informasi Secara Selektif

3.3. Upaya Mengatasi Faktor-faktor Penghambat Pengembangan Organisasi

Upaya mengatasi faktor-faktor penghambat Pengembangan Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow menurut Robbins dan Judge ada 8 upaya untuk mengatasi faktor penghambat perubahan organisasi yaitu Pendidikan dan komunikasi, Partisipasi, Membangun dukungan dan komitmen, Membangun relasi yang positif, Perubahan secara berimbang, Manipulasi dan kooptasi, Memilih orang yang menerima perubahan, dan Memberikan tekanan.

1. Pendidikan dan Komunikasi

Upaya mengatasi faktor penghambat Pengembangan Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan pendidikan dan komunikasi dilakukan dengan cara berbagi informasi dari masing masing anggota bahwa pengembangan itu membawa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk menjadi lebih baik lagi dan memberi motivasi kepada seluruh anggota. Selain itu juga membuat hal-hal positif untuk membangun citra perubahan yang positif. Agar tujuan pengembangan organisasi untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Partisipasi

Upaya mengatasi faktor penghambat dengan melibatkan para anggota yang tidak setuju dengan adanya pengembangan dalam rencana pengembangan organisasi. Dengan begitu para individu dalam organisasi mempunyai dapat mengerti maksud dan tujuan yang sama untuk kemajuan organisasi, keterlibatan mereka akan meminimalisasi penolakan-penolakan individu dalam organisasi.

3. Membangun Dukungan dan Komitmen

Upaya melalui dukungan dan komitmen ini digunakan bila ada yang tidak setuju dan menolak pengembangan organisasi dengan cara memberikan dukungan berupa pemberian insentif yang lebih serta memberikan hibah kepada bagian yang ada dalam organisasi serta memberi motivasi dan

dukungan emosional kepada anggota atas adanya perubahan. Dengan begitu para anggota menjadi nyaman serta tidak perlu takut dengan adanya pengembangan.

4. Membangun Relasi Yang Positif

Anggota organisasi lebih mudah menerima pengembangan jika mereka percaya pemimpin mampu mengimplementasikannya. Para anggota yang mempunyai hubungan positif dengan pimpinan dan merasa lingkungan kerja mendukung pengembangan bersikap positif terhadap perubahan. Individu yang percaya kepada pimpinan memiliki sikap positif pada perubahan. Pimpinan harus dapat memfasilitasi dan membangun hubungan yang positif dengan para anggota organisasi.

5. Perubahan Secara Berimbang

Upaya mengatasi faktor penghambat dengan menawarkan insentif kepada anggota yang menolak pengembangan, dengan menaikkan gaji atau merubah aturan kerja. Kesepakatan yang dinegosiasikan dapat menjadi cara yang relatif mudah untuk menghindari penolakan dari para anggota yang tidak setuju.

6. Manipulasi dan Kooptasi

Upaya mengatasi faktor penghambat Pengembangan Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan manipulasi dan kooptasi, dalam Pengembangan Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah hal ini tidak diperlukan dan sangat di hindari. Upaya ini tidak akan sampai digunakan dalam mengatasi faktor penghambat pengembangan organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah karena sejatinya para anggota yang merupakan unsur pimpinan pasti sudah paham dan dapat mengerti hal tersebut.

7. Memilih Orang yang Menerima Perubahan

Upaya mengatasi faktor penghambat Pengembangan Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan memilih orang yang menerima perubahan, upaya ini dilakukan agar orang-orang ini dapat mempengaruhi anggota yang lainya agar dapat menerima perubahan juga. Tetapi anggota forum koordinasi pimpinan daerah merupakan pimpinan semua mereka sudah pasti dapat menerima perubahan serta dapat mempengaruhi serta mengajak agar orang lain juga dapat menerima perubahan yang akan terjadi.

8. Memberikan Tekanan

Upaya mengatasi faktor penghambat Pengembangan Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan memberikan tekanan, tekanan diberikan agar para anggota dapat menerima perubahan yang akan terjadi. Upaya ini dalam Pengembangan Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tidak bisa dilakukan mengingat para anggota merupakan unsur pimpinan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pengembangan suatu organisasi memiliki tujuan untuk menyempurnakan organisasi tersebut supaya dapat melaksanakan fungsinya secara optimal. Begitu juga dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang berkembang untuk dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Kabupaten Bolaang Mongondow secara optimal. Pengembangan tersebut memiliki dampak yang baik sesuai dengan harapan baik pimpinan maupun anggota dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang mana anggotanya juga merupakan pimpinan-pimpinan daerah dari berbagai sektor urusan. Seperti Kapolres, Dandim, dan Kejari.

Hadirnya pengembangan ini menuntut keseluruhan sel dalam organisasi untuk tumbuh dan berkembang. Perubahan dari dalam maupun dari luar terjadi akibat pengembangan organisasi. Kemudian untuk mengukur hal tersebut, beberapa indikator digunakan supaya dihasilkan ukuran yang akurat dan presisi. Tidak hanya pengembangannya yang menggunakan pengukuran, namun terhadap faktor penghambat dan pendukung serta upaya juga diukur dengan teori yang valid.

Peneliti menemukan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow

saat ini belum memiliki sekretariat, namun fungsi koordinasinya telah berjalan. Sehingga dalam pengembangan ini, diharapkan sekretariat FORKOPIMDA segera dibangun supaya fungsinya berjalan secara optimal. Menariknya, tak hanya organisasi ini tidak memiliki sekretariat, payung hukum organisasi belum maksimal dalam meregulasi. Undang-undang yang ada hanya berasal dari pusat, yaitu FORKOPIMDA secara general. Pembahasan mengenai spesifikasi organisasi di daerah belum memiliki peraturan perundangan yang berlaku. Ini menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk segera menyusun perundangan yang berlaku. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk mengoptimalkan kerja organisasi. Sebab belum memiliki peraturan yang saklek, penganggaran program kerja atau pertemuan juga menjadi hambatan bagi organisasi. Anggaran dapat diambil dari daerah namun perlu memiliki dasar hukum yang jelas, sementara saat ini belum ada peraturan daerah yang mengatur. Begitu pula mengenai struktur dan visi misi. Oleh sebab itu, pengembangan diharapkan berjalan sesuai dan dapat membawa perubahan yang baik bagi organisasi itu sendiri maupun masyarakat sebagai penerima pelayanan.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menemukan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kabupaten Bolaang Mongondow telah terjadi sebagai penyempurnaan organisasi tersebut. Namun, dalam proses pengembangannya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mengalami hambatan baik berasal dari individu maupun organisasi. Tak hanya itu, pengembangan organisasi juga didukung oleh faktor pendukung berupa kekuatan perubahan. Meskipun belum optimal, pengembangan akan terus dilakukan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini dilakukan di Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di bagian tata pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan pengembangan organisasi FORKOPIMDA.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, Ketua FORKOPIMDA beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bradford, D. d. (2005). *Reinventing Organization Development New Approaches to Change in Organizations*. California: Pfeiffer.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Judge, S. P. (Ratna Saraswati dan Febriella Sirait, 2017). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kinicki, R. K. (biro bahasa alkemis, 2014). *Perilaku Organisasi*, edisi 9. Jakarta: Salemba Empat.
- Kothari, C. (2004). *Research Methodology : Methods and Techniques*. New Delhi: New Age

International (P) Ltd.

Siagian, S. P. (1999). *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Siagian, S. P. (2012). *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Simangunsong, F. (2014). *Transformasi Organisasi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan*. Bandung: Alfabeta.

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Azikin, A. (2018). Peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 44(2), 139-154.

Maulidiah, S. (2018). Fungsi Forum Koordinasi Pemerintahan Daerah (FORKOPIMDA) Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal Of Government, Social and Politics*, 4(1).

